



INTISARI

Seiring dengan desentralisasi pendidikan dalam otonomi daerah, maka setiap daerah berhak melakukan inovasi kebijakan pendidikan untuk peningkatan mutu dan akses masyarakat terhadap pendidikan. Sejak tahun 2006 Kabupaten Sinjai menerapkan kebijakan Pembebasan Biaya Sekolah (PBS) yang merupakan salah satu inovasi kebijakan pendidikan oleh Pemkab Sinjai. Dalam implementasinya terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan program PBS. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi PBS, isu politisasi pendidikan dan perubahan peranan orang tua dan komite sekolah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan oleh Edward III, politisasi oleh Janice E. Perlman dan peranan komite sekolah oleh Depdiknas. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, informasi utama diperoleh melalui wawancara dengan beberapa kepala sekolah SMA/ sederajat, guru, komite sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, Kabag Tata Usaha Dinas Pendidikan, dan beberapa orang tua siswa. Data juga diperoleh melalui dokumen baik dari laporan-laporan, surat kabar, majalah dan internet.

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa: *Pertama*, proses implementasi PBS belum berjalan dengan baik. Beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain: keterlambatan pencairan dana PBS dan dana PBS masih minim jika dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan sekolah. Sosialisasi program juga belum berjalan dengan baik, meskipun demikian, masyarakat sangat merespon positif kebijakan ini, karena sangat membantu bagi siswa yang tingkat ekonominya pas-pasan; *Kedua*, isu politisasi pendidikan tidak bisa lepas dari kebijakan PBS. Ada kesan Bupati menjadikan program PBS untuk meningkatkan popularitasnya di masyarakat. Ada beberapa indikasi tentang hal tersebut, yaitu kebijakan PBS hanya dipayungi SK bupati, penamaan kebijakan yang kurang sesuai dengan isi kebijakan dan tidak ada upaya konkret oleh bupati untuk mengatasi keterlambatan pencairan PBS; *Ketiga*, telah terjadi perubahan peranan orang tua maupun komite sekolah dalam beberapa hal setelah program PBS diterapkan. Orang tua sudah dibebaskan dari SPP kecuali sumbangan lain yang tidak mengikat, sehingga komite bersama sekolah tidak lagi memungut dan mengelola SPP dari orang tua. Kondisi ini menyebabkan kedekatan emosional sekolah dengan orang tua menjadi berkurang. Komite sekolah juga semakin sulit memperoleh dana dari orang tua yang sifatnya tidak mengikat.

Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemkab Sinjai yaitu: *Pertama*, dalam menetapkan besarnya dana PBS harus berdasarkan kebutuhan tiap sekolah, bukan berdasarkan rata-rata besarnya anggaran dari semua sekolah; *Kedua*, Pemkab Sinjai seharusnya mengubah nama kebijakan dari Program Pembebasan Biaya Sekolah (PBS) atau lebih populer di masyarakat dinamakan pendidikan gratis menjadi yang lebih spesifik, misalnya program SPP gratis; *Ketiga*, jika keuangan daerah tidak mampu memenuhi anggaran yang diajukan sekolah maka sebaiknya diterapkan kebijakan subsidi silang, orang tua yang ekonominya menengah ke atas tetap membayar SPP sehingga membantu Pemkab dalam membiayai operasional sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan.

Kata kunci : *proses, pembebasan biaya sekolah, politisasi pendidikan, peranan orang tua dan komite sekolah*



ABSTRACT

Along with the decentralization of education in the autonomy regions, each region have the right to innovating education policies to improve quality and access to public education. Since 2006, a policy Sinjai regency Exemption School Free (PBS), which is one of the innovations in education policies by Regent Government of Sinjai. In the implementation, there are several problems that hinder the achievement of the objectives of the program PBS. Therefore, this research aims to understand the process of implementation of the PBS, politization of education issues and changes in the role of parents and school committees.

Theory used in this research is the implementation of the policy by Edward III, politization by Janice E. Perlman and the role of the school committee by the Ministry of Education. This type of research is descriptive and qualitative, the main information obtained through interviews with some of the senior high school equivalent, teachers, school committee, the head of the Office of Education, the Head of Administration Office of Education, and some parents. The data also obtained through documents from the reports, newspapers, magazines and the Internet.

The results of the discussion is known that: First, the process of implementation of the PBS has not been running well. Some problems that occur, among others: the delay in disbursement of funds PBS and PBS still minimal when compared with the many needs of the schools. Socialization programs also are not going well, however, the public responded very positively this policy, because it is very helpful for students that the level of economic development barely; Second, the issue politization of education cannot be separated from policy PBS. There is the impression made Regent PBS program to increase the popularity in the community. There are some indications about this, the policy PBS only legally by Regent Degree (SK), naming policies that are less in accordance with the contents of the policy and there is no concrete efforts by the regents to delay disbursement PBS; Third, there have been changes in the role of parents and school committees in some cases after the PBS program implemented. Parents are exempt from fees unless other donations that are not binding, so the committee with the school no longer collect and manage fees from parents. This condition causes the emotional ties with school parents to be reduced. The school committee also increasingly difficult to obtain funds from parents who are not binding.

Research is recommended to the Regent Government of Sinjai, namely: First, the amount of funds must be based on the PBS needs of each school, not based on the average size of the budget of all schools; Second, the Regent Government of Sinjai should change the name of the policy of Exemption Program School (PBS) or more popular in the community called free education to be more specific, for example, the program tuition free; Third, if the financial district is not able to meet the proposed school budget should be applied cross-subsidy policy, parents of middle to the top of the economy still pay tuition so that regent government help in financing operational schools to improve education quality.

Keywords: process, exempting school free, politization of education, the role of parents and school committee.



Pembebasan biaya sekolah di Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan

ZULCHAIDIR, Dr. Agus Pramusinto, MDA

Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

